

ATURAN JHT PERLU DITINJAU ULANG

Uang Pekerja, Bukan dari APBN

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham meminta Pemerintah meninjau ulang Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

"Aturan tersebut cacat logika dan tidak adil sehingga tidak heran jika menimbulkan kegaduhan," Aliyah Mustika dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/2).

Menurutnya, aturan yang menyebutkan bahwa manfaat JHT di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa diambil saat pekerja memasuki pensiun atau di usia 56 tahun, merupakan kebijakan tidak tepat. Diingatkan bahwa anggaran JHT bukan berasal dari APBN namun diambil dari langsung dari uang pekerja.

"Bagaimana bisa Pemerintah melalui Kemenaker melarang pekerja atau peserta JHT untuk mengambil uangnya? Anggaran JHT bukan dari APBN, itu diambil langsung dari uang pekerja," ujarnya.

Karena itu Aliyah Mustika Ilham menilai secara logika JHT merupakan milik pekerja, sehingga tentu saja hal itu sangat berguna bagi pekerja yang selama ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan saat terkena PHK atau berhenti karena sebab lain sebelum berusia 56

tahun.

Aliyah menjelaskan, jika seseorang berhenti atau diberhentikan kerja dan berhak atas JHT sebelum usia 56 tahun, maka yang bersangkutan memiliki kesempatan yang cukup untuk memanfaatkan usia produktifnya.

"Jadi seharusnya JHT memang dapat dimanfaatkan oleh pekerja dalam keadaan mendesak. Tidak semua orang kalau kehilangan pekerjaan itu punya tabungan yang cukup, apalagi saat pandemi seperti sekarang, semua serba tidak pasti," katanya.

Ia menjelaskan, Fraksi Partai Demokrat berpandangan, para pekerja adalah pihak paling dirugikan dengan Permenaker yang antara lain mengatur soal pengambilan JHT.

(Ant)-f



KR-Sukro Riyadi

PEMBANGUNAN JJLS: Pengerjaan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, terus dilakukan, Sabtu (19/2). Hadirnya jalan utama di Selatan Pulau Jawa membuat masyarakat semakin optimis perekonomian bisa tumbuh lebih cepat, selain wisata sebagai motor penggerak ekonomi berbasis masyarakat, usaha lain juga makin bergairah.

Penting, Ekosistem Digital Ramah Anak

JAKARTA (KR) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menegaskan pentingnya para pemangku kepentingan membangun ekosistem digital yang ramah anak.

Hal itu dilatarbelakangi banyaknya kejahatan berbasis daring (online) yang menyerang anak-anak, sehingga membuat anak-anak menjadi kelompok rentan di dunia maya.

"Anak-anak saat ini masih menjadi kelompok rentan, mengingat banyaknya risiko kekerasan termasuk di ranah siber. Berkembangnya teknologi digital ini dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab akan adiksi internet, pornografi, hingga eksploitasi dan kekerasan berbasis online," kata Menteri PPPA dalam webinar di Jakarta, Minggu (20/2).

Bintang mengatakan, berdasarkan data Kementerian PPPA pada 2021, terdapat setidaknya 345 anak menjadi korban pornografi berbasis daring dan kejahatan siber (cybercrime). Tercatat 19 anak menjadi pelaku pornografi berbasis daring.

"Kejahatan-kejahatan seksual berbasis online seperti child grooming, pornografi,

cyberbullying, hingga eksploitasi anak menjadi warning kita untuk bersama-sama melindungi diri di dunia digital, dengan membangun ekosistem digital yang ramah anak," katanya.

"Dengan bergandengan tangan seluruh pemangku kepentingan yang sportif dan ramah anak, dapat mendorong Indonesia Layak Anak di 2030 dan Indonesia Emas di 2045. Anak-anak adalah pelopor dan pelapor, ujung tombak perjuangan pengaduan kekerasan," tambahnya.

Di sisi lain, Kementerian PPPA secara umum melakukan beberapa upaya dan perencanaan yang berkualitas untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan capaian pembangunan perlindungan anak. Salah satunya menyediakan aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). SIMFONI PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi pengintegrasian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

(Ant/San)-f

BANYAK PASIEN PILIH ISOLASI MANDIRI
Pemda DIY Siap Aktifkan Satgas Isoman

YOGYA (KR) - Banyaknya pasien Covid-19 di DIY yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah, perlu disertai pemantauan secara ketat untuk memastikan kondisi pasien benar-benar baik. Untuk itu, Pemda DIY membuka opsi mengaktifkan kembali Satgas Isoman yang bertugas memantau dan merujuk pasien ke tempat isolasi terpusat (isoter).

"Mayoritas pasien yang terpapar Covid-19 memilih untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Meski menjalani isoman harus dipastikan mereka bisa mendapatkan layanan secara baik, khususnya terkait layanan kesehatan. Untuk itu jika nanti memang diperlukan ada petugas untuk menjemput dan memberi layanan di rumah. Keberadaan Satgas Isoman bisa saja diaktifkan kembali," kata Sekda DIY K Baskara Aji, Minggu (20/2).

Baskara Aji mengatakan, salah satu pertimbangan pasien untuk me-

lakukan isoman karena mayoritas dari mereka adalah orang tanpa gejala (OTG). Selain itu gejala yang dirasakan masih tergolong ringan, sehingga tidak membutuhkan pengawasan di rumah sakit. Meski begitu, pengawasan terhadap mereka harus selalu dilakukan secara rutin.

Saat ini pengawasan masih dilakukan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Tapi kalau jumlah kasus terus meningkat, keberadaan Satgas Isoman menjadi penting. "Melihat kondisi sekarang, selain memperketat penegakan prokes, bagi kelompok rentan seperti lansia atau mereka yang memiliki komorbid dan terpapar Covid-19 sebaiknya masuk ke shelter isolasi untuk mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan pada pasien isoman," ujarnya.

Menurut Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP) Setda DIY Ditya Nanaryo Aji, kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY bertambah 1.807 kasus menjadi

total 173.533 kasus pada Minggu (20/2). Untuk pasien sembuh bertambah 403 menjadi 153.498 kasus dan pasien meninggal bertambah empat menjadi 5.311 kasus.

Secara nasional, sebanyak 140,30 juta penduduk Indonesia telah menerima vaksin lengkap. Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, jumlah penerima vaksin dosis pertama pada Minggu (20/2) tercatat 113.219 jiwa. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama menjadi 189.646.917 jiwa. Untuk vaksinasi dosis ketiga bertambah 129.990 jiwa menjadi 8.456.612 orang. Pemerintah berencana memvaksinasi sebanyak 208.265.720 orang.

Dengan demikian suntikan dosis pertama sudah diberikan pada 91,06 persen dari total 208.265.720 warga sasaran. Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi dosis kedua meliputi 67,36 persen dari total sasaran.

(Ria/Ira/Ati)-f

Dispar DIY Adakan Lomba Desa, Kampung Wisata dan Homestay



Suasana lomba di kampung kali gajah wong

YOGYA (KR) - Dinas Pariwisata DIY menyelenggarakan Lomba Desa dan Kampung Wisata serta Homestay tingkat DIY 2022. Lomba diikuti 15 desa dan kampung wisata serta homestay perwakilan kabupaten dan kota. Kabupaten Bantul diikuti Desa Wisata Karangasem, Srikeminut, Kaji (Kadisoro Nyawiji Dadi Siji). Kota Yogyakarta diikuti Kampung Wisata Warungboto, Dewa Bronto Kali Gajah Wong. Kabupaten Kulonprogo diikuti Desa Wisata Purwosari, Widosari, Hargotirto. Kabupaten Sleman diikuti Desa Wisata Pancoh, Grogol, Gabugan. Sedangkan Gunungkidul diikuti Desa Wisata Katongan, Ngestirejo dan Tepus.

Dra Titik Sulistiyani, Kabid Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata DIY saat kunjungan lapangan di Kampung Wisata Warungboto, Kamis (17/2) menjelaskan, perlombaan ini merupakan pembinaan sekaligus untuk memotivasi, monitoring kegiatan desa dan kampung wisata khususnya saat pandemi. Hal ini bertujuan agar desa wisata sebagai destinasi wisata dapat go internasional memenuhi standar wisata internasional. Titik juga

menambahkan, selain dilombakan kegiatan tersebut juga sebagai pendampingan dan pengarahan desa dan kampung wisata.

"Kami juga kunjungan lapangan bersama tim juri dalam rangka verifikasi administrasi baik berdasarkan jadwal ataupun kunjungan insidental," ucapnya. "Kami harap kepariwisataan akan kembali bangkit agar ekonomi masyarakat kembali pulih," terang Titik. Saat kunjungan lapangan di Desa Wisata Warungboto dan Omah Glagahsari Homestay, enam juri melakukan verifikasi yakni dari Dinas Pariwisata DIY, akademisi, DPD GPI DIY dan IHGMA DIY, Media dan Forkom Desa Wisata DIY.

Kriteria penilaian lomba desa dan kampung wisata memakai standar CBT ASEAN. Sedangkan kriteria penilaian lomba homestay tingkat DIY 2022 diantaranya homestay merupakan bentuk usaha perorangan yang tidak berbadan hukum, bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya, kamar yang disewakan maksimal empat unit dan usaha yang dilaksanakan meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Penyerahan penghargaan rencananya oleh Gubernur DIY pada 23 Maret 2022. Peserta yang mendapat nilai tinggi akan mendapatkan tropi penghargaan dan uang pembinaan untuk juara I hingga harapan III. (Sal)



Suasana lomba di kampung wisata Warungboto

PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

GEMPU ROKOK ILEGAL

GIRI - GIRI ROKOK ILEGAL :

dr. Hj. Eisti'anah, S.E

BUPATI DEMAK

KH. ALI MAKHSUN, M.SI

WAKIL BUPATI DEMAK

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL KE KANTOR BEA CUKAI SEMARANG
MELALUI (024) 76430205 ATAU MELALUI INSTAGRAM @beacukaisemarang